



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SAMBUTAN KETUA KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM ACARA
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN AGENDA
PENJELASAN KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP USUL
PRAKARSA RANCANGAN PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PELAYANAN PUBLIK**

SEMARANG, 6 MEI 2026

Disampaikan Oleh :

(RIBUT BUDI SANTOSO)

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu,
Namo Budaya,
Salam kebajikan, Rahayu.

Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah;
Yang terhormat Bapak Ketua dan segenap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
Yang kami hormati, segenap sahabat-sahabat Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan
hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka
penyampaian penjelasan usul prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya Komisi
A, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.

Hadirin yang kami hormati,

Pelayanan publik merupakan wajah utama kehadiran negara di tengah masyarakat.
Kualitas pelayanan publik tidak hanya mencerminkan kinerja birokrasi, tetapi juga
menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu,
penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan
merupakan sebuah keniscayaan yang harus terus kita perkuat.

Namun demikian, kami mencermati bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Jawa Tengah saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah belum optimalnya integrasi layanan antar perangkat daerah, masih adanya kesenjangan kualitas pelayanan antar wilayah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik yang responsif dan adaptif.

Hadirin yang kami hormati,

Kami mencermati bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Tengah saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Di antaranya adalah belum optimalnya integrasi layanan antar perangkat daerah, masih adanya disparitas kualitas layanan antar wilayah, serta pemanfaatan teknologi digital yang belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan regulasi nasional maupun tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Jika kondisi ini tidak segera dilakukan penyesuaian kebijakan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada stagnasi kualitas layanan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk menginisiasi usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik sebagai langkah pembaruan regulasi yang lebih adaptif, komprehensif, dan berorientasi pada hasil

Hadirin yang kami hormati,

Beberapa substansi penting yang kami dorong dalam Raperda ini antara lain:

- Pertama, penguatan standar pelayanan publik yang terukur dan berbasis kinerja sebagai instrumen evaluasi yang jelas.
- Kedua, percepatan transformasi digital pelayanan publik melalui integrasi sistem layanan berbasis elektronik yang saling terhubung.
- Ketiga, penguatan kelembagaan pembinaan dan pengawasan agar terdapat kejelasan peran, tanggung jawab, serta akuntabilitas penyelenggara pelayanan.
- Keempat, penegasan jaminan akses pelayanan bagi kelompok rentan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkeadilan.

- Kelima, penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang tidak hanya responsif, tetapi juga berdampak pada perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Kami menekankan bahwa Raperda ini diharapkan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi menjadi instrumen yang benar-benar mendorong perubahan nyata dalam praktik pelayanan publik di Jawa Tengah.

Hadirin yang kami hormati,

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan usul prakarsa Raperda tentang Pelayanan Publik kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dukungan penuh, masukan konstruktif, serta komitmen bersama dalam proses pembahasan Raperda ini, sehingga nantinya dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Tengah. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan.

Hadirin yang kami hormati,

Akhirnya, kami berharap upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul muwaffiq Ila 'aqwamitthariq.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

**KOMISI A DPRD PROVINSI
JAWA TENGAH
KETUA**

IMAM TEGUH PURNOMO, S.E., Akt.